

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau *One Top Service* Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat adalah sistem yang diterapkan dan mampu menyederhanakan proses pelayanan publiknya, mempercepat waktu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Hal ini turut mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di wilayah provinsi. Namun demikian, efektivitas tersebut masih belum optimal secara menyeluruh, terutama dalam waktu 5 tahun terakhir perizinan penanaman modal asing yang perizinannya dilakukan secara terpusat, dan berbelit – belit.
2. Dampak dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau *One Top Service* dalam Penanaman Modal Asing yaitu memberikan dampak positif dan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap penanaman modal asing (PMA), Dampak positif ini mendorong meningkatnya kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan realisasi investasi asing di wilayah tersebut. Sedangkan, dampak negatif juga masih terlihat, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, belum meratanya kualitas pelayanan di tingkat kabupaten/kota, serta masih adanya kendala teknis dalam sistem digital dan kurang sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, meskipun PTSP telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong PMA di Provinsi Sumatera Barat, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan

kualitas SDM, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan ini pemerintah lebih berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah agar terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Ditinjau ulang peraturan Perda terkait Penanaman Modal Asing dikarenakan dahulu proses birokrasi perizinan terhadap PAM berada didaerah akan tetapi sekarang Proses tersebut sudah berpindah menjadi kewenangan perizinan yang terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2019, *Hukum Penanaman Modal*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Erman Rajagukguk, 2017, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Edisi Kedua, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Hendrikson, L., 2015, *Foreign Direct Investment and Economic Development*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Haula Adolf, 2004, *perjanjian penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hill, C. W. L., 2005, *International Business: Competing in the Global Marketplace*. McGraw-Hill.
- Ida Bagus Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Penanaman Modal Langsung Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jonker ,Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Muchsin, 2020, *Hukum Investasi Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Siahaan, A. & Wibowo, J., 2018, *Peran PMA dalam Perekonomian Daerah*, Alfabeta, Bandung.
- Salim HS, Budi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soeprpto, J., 2015, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2018, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal.

Trade Related Investment Measures

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.

C. Sumber Lainnya

Adelia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Persyaratan Penanaman Modal yang Terkait dengan Perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal*
<https://repositoris.usu.ac.id/handle/123456789/89/6541>. Diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 21.30 WIB.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 22.00 WIB.

Fadli, A. (2017). *Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.30 WIB.

Iskandar, A. (2018). *Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Proses Perizinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 19.35 WIB.

Siregar, R., & Aziz, R. (2018). "Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Barat". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 20.30 WIB.

Hukum Online, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, <https://tinyurl.com/2h3w2386> diakses pada tanggal 21 juli 2025 Pukul 22.00 WIB

Mardiasmo, D. 2012. *Manajemen Publik*. Jurnal Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik, diakses pada tanggal 21 juli 2025 Pukul 22.10 WIB

Sri Wahyuni & Nora Eka Putri. 2024. *Peran DPMPTSP dalam Meningkatkan PMA di Sumatera Barat*, Villages: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, diakses pada tanggal 21 juli 2025 Pukul 22.20 WIB

Laurensius Arlimar, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* <https://tinyurl.com/4eukmyl2> diakses pada tanggal 22 juli 2025 pukul 19.00 WIB,

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Kinerja 2023* <https://dpmptsp.sumbsrfprov.go.id/> diakses pada tanggal 25 juli 2025

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Evaluasi Infrastruktur TIK Daerah 2023* <https://www.komdigi.go.id> diakses pada tanggal 25 juli 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmptsp.sumbar.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 25 juli 2025

Kementerian Investasi/BKPM, *Permudahan Izin Usaha Pemerintahan Indonesia Luncurkan Sitem OSS Berbasis Risiko* <https://www.bkmp.go.id/> diakses pada tanggal 26 juli 2025